

ANALISIS PROSPEK POLITIK BURUH PASCA PEMILU 2014

Triyono

Peneliti Ketenenagakerjaan Pusat Penelitian Kependudukan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
tri.lipi010@gmail.com

Abstract

The reformation era has changed the condition of political economic, social and cultural. Its mean that the political system can be impact on labours mobility. The labour try to enter the political practice by participating in legislative elections. Actually, they haven't be able to get into parliament. In the 2014's general election, there is no labour party as participants. On the other side, the labours has been struggling with its own problems, especially in the problems of fragmentation and organizing. In order to seek the existence of labours in Indonesian politics post 2014's general election by elaborating librarian data and discussion with experts. This article was described by descriptive analysis which is explained the phenomena of labours in politics. The conclusion was the prospect of labours in 2014's general election doesn't win the political contestation, because of several factors influence it both in the internal and external.

Key word: labour, politics, general election

Abstrak

Era Reformasi telah merubah politik ekonomi dan sosial budaya. Tatanan politik berpengaruh terhadap suara buruh. Buruh di Era Reformasi mencoba masuk ke ranah politik praktis dengan berpartisipasi dalam Pemilihan Umum legislatif, namun sejauh ini belum mampu masuk ke parlemen. Dalam Pemilu terakhir 2014, tidak ada satupun partai yang berhaluan buruh sebagai peserta. Disisi lain buruh masih berkuat dengan permasalahannya sendiri berupa fragmentasi buruh dan pengorganisasian. Untuk mengetahui bagaimana lebih lanjut mengenai eksistensi buruh dalam perpolitikan nasional pasca pemilu 2014, penulis melakukan studi literature, dan diskusi dengan para pakar. Analisis dalam artikel ini bersifat deskriptif analisis yaitu menjelaskan dan menggambarkan fenomena buruh dalam perpolitikan. Artikel ini dapat disimpulkan bahwa prospek buruh pasca Pemilu 2014 tidak akan mampu meraih kemenangan politik, dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhinya baik dari sisi internal maupun eksternal.

Kata kunci : buruh, politik, reformasi, pemilu

Pendahuluan

Tumbangnya Rezim Orde Baru dan munculnya reformasi memberikan perubahan yang mendasar bagi aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya. Reformasi telah merubah tatanan hukum, termasuk sektor ketenagakerjaan. Perubahan ketenagakerjaan tersebut meliputi jaminan sosial, upah, hubungan industrial dengan pengusaha serta kebebasan berserikat bagi pekerja/buruh. Perubahan kebebasan berserikat bagi buruh terjadi setelah pemerintah mengeluarkan Kepres No. 83 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 87 Mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi. Ratifikasi konvensi ILO tersebut diikuti dengan keluarnya Undang-Undang tentang Serikat Kerja UU No. 21 Tahun 2000. Jaminan hak kebebasan buruh tersebut diikuti dengan munculnya berbagai serikat kerja, federasi, konfederasi buruh dan pekerja bahkan partai buruh juga bermunculan. Hal ini jelas sangat berbeda pada zaman orde baru, dimana kehidupan buruh sangat dipasung.

Pada Orde Baru berkuasa, pemerintah hanya mengakui *single union*. Setelah Era Reformasi bergulir serikat kerja/buruh menjadi *multi union*. Kemudian kebijakan perburuhan sebelum Orde Reformasi bergulir ditujukan untuk memuaskan selera pasar dibandingkan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar dan hak-hak buruh (Detri, Nugraha Pamungkas dan Agus Trilaksana, 2013: 462).

Peran buruh pasca reformasi pun semakin mewarnai kehidupan politik tanah air. Buruh sebagai salah satu elemen masyarakat berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gerakan buruh pada awalnya bertujuan menghilangkan penindasan berupa jam kerja yang panjang, kondisi kerja yang buruk serta upah yang rendah (Triyono, 2013). Seiring berjalannya waktu pemikiran dan perjuangan buruh tidak hanya sebatas pada perjuangan kelas semata, melainkan telah terjadi perubahan pola pemikiran yang sangat jauh dengan adanya kesadaran untuk membentuk serikat buruh. Organisasi pekerja/buruh

semula berfungsi sebagai wadah berinteraksi dan komunikasi pekerja, menjadi alat untuk memperjuangkan hak-hak normatif pekerja, memberikan perlindungan, membela dan mengupayakan peningkatan kesejahteraan (P, Oktav Zamzani, 2011: 110). Melihat perjuangan serikat buruh yang tidak kunjung berhasil, buruh mencoba ke ranah politik dengan membentuk partai buruh seperti di Inggris dan Australia. Hal ini memunculkan : pertanyaan bagaimana perkembangan perjuangan buruh di Indonesia dan bagaimana prospek peta politik buruh pasca Pilpres 2014?

Berbicara tentang gerakan politik buruh, tidak akan terlepas dari aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, seperti serikat buruh, buruh dan pemimpin buruh. Aktor di luar buruh sendiri seperti pengusaha, pemerintah serta perundang-undangan juga berpengaruh terhadap kehidupan politik kaum buruh. Sangat menarik berbicara politik perburuhan, karena adanya kesadaran kelas buruh pasca reformasi yang bermuara kepada perjuangan hak buruh dan kemudian menciptakan perlawanan-perlawanan buruh dengan beragam bentuk, seperti demonstrasi, mogok kerja, membentuk serikat buruh atau partai politik. Di Indonesia sendiri partai yang berhaluan buruh telah muncul ada sejak satu abad yang lalu.

Kontestasi buruh dalam perpolitikan nasional telah memberikan warna dalam demokrasi Indonesia. Perpolitikan buruh pada masa Orde Baru tidak semeriah ketika Orde Lama berkuasa. Hal tersebut tidak terlepas dari gerakan-gerakan buruh, yang dinilai ada kaitannya dengan peristiwa pemberontakan PKI tahun 1965. Setelah Orde Baru berkuasa gerakan politik buruh semakin tercerai berai dengan adanya peraturan "*Single Union*". Hal tersebut mengakibatkan gerakan-gerakan buruh sangat mudah untuk dikontrol. Di sisi lain kebijakan pemerintah *Single Union* tersebut bertujuan untuk meningkatkan hubungan yang harmonis antara buruh dan pengusaha. Namun di sisi lain opsi penyatuan gerakan buruh dalam satu konfederasi yang bernama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) membuat pekerja atau buruh tidak memiliki saluran untuk menyampaikan aspi-

rasinya karena tidak tertampung dalam partai politik.

Kebuntuan politik yang dialami buruh pada masa Orde Baru, akhirnya terpecahkan pada masa reformasi. Pemerintahan era reformasi berhasil meratifikasi konvensi ILO No. 101 tentang kebebasan buruh untuk berserikat. Namun inipun diragukan apakah kebebasan buruh semakin meningkatkan perannya dalam tataran kebijakan politik atau justru memperlemah gerakannya. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran buruh dalam mewarnai politik tanah air khususnya pasca pemilu 2014 dan apa saja yang menyebabkan buruh sulit untuk membentuk partai politik yang kuat dan mampu berkuasa di parlemen.

Sejarah Politik Buruh

Politik buruh selalu menarik untuk dikaji karena menimbulkan berbagai tanggapan bahkan ketegangan dimasyarakat. Bahkan sejarah mencatat sebelum Indonesia merdeka pergerakan politik buruh telah ada dan mewarnai perjuangan di Indonesia. Di sisi lain buruh memiliki ragam ideologis. Hal ini nampak jelas ketika pemilu 2014, ketika itu suara buruh terpecah. Namun sebelum menganalisis lebih lanjut mengenai politik buruh pasca pemilu 2014. Penulis terlebih dahulu ingin memaparkan sejarah politik buruh. Hal ini untuk mengantarkan posisi dan memprediksi politik buruh pasca pemilu 2014. Kemudian bagian selanjutnya menguraikan apa saja yang menyebabkan buruh tetap sulit dalam meraih suara politik pasca pemilu 2014, dan yang terakhir menelaah kemungkinan terbentuknya partai buruh yang kuat dan mampu memenangkan pemilu *pasca* pemilu 2019.

Buruh sebagai entitas warga negara memiliki peranan dalam perkembangan pergerakan Indonesia. Bahkan gerakan buruh menjadi salah satu pioner adanya gerakan atau organisasi-organisasi modern di Indonesia. Di samping itu keberadaan organisasi buruh telah menjadi *bargaining position* buruh khususnya

dan bangsa Indonesia umumnya terhadap Pemerintahan Hindia Belanda. Hal tersebut terlihat ketika Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staatband*.1837 No.801 memberikan kewenangan kepada Menteri Sosial dan perantara mengatur tentang perjanjian kerja di perusahaan yang bersifat nasional (Sutedi, Andrian, 2011: 95)

Kemudian pergolakan politik buruh pada awal kemerdekaan, diawali dengan adanya pembentukan sebuah organisasi massa buruh yang bernama BBI (Barisan Buruh Indonesia). Organisasi ini mengutamakan barisan buruh untuk memudahkan mobilisasi oleh serikat pekerja dan Partai Buruh. Dalam kongresnya pada bulan September 1945 yang dihadiri oleh kaum buruh dan tani, tercetuslah Partai Buruh Indonesia (Sazalil, Kirom, 2013:13). Adanya partai buruh tersebut menjadi salah satu element perjuangan buruh dalam membantu mempertahankan tanah air. Setelah masa revolusi usai, pergerakan politik buruh semakin mewarnai perpolitikan nasional. Dengan adanya berbagai macam serikat atau partai yang berhaluan buruh. Pemilu yang menjadi fundamental bagi gerakan buruh adalah pada pemilu 1955. Pada pemilu tahun 1955 partai komunis sebagai salah satu partai yang berhaluan buruh menjadi pemenang ke 4. Adanya kontestasi kiprah Partai Komunis Indonesia (PKI) tersebut mengakibatkan politik nasional semakin memanas. Puncaknya adalah adanya gerakan pemberontakan pada tahun 1965. Sebelum pemberontakan 1965, komunis telah memberontak pada tahun 1927 dan 1948.

Adanya pemberontakan oleh komunis tersebut mengakibatkan stigma sejarah bahwa kaum komunis tidak mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Stigma yang melekat terhadap kaum komunis tersebut pada akhirnya berpengaruh terhadap kaum buruh. Sehingga secara langsung berpengaruh terhadap aktivitas politik kaum buruh. Padahal tidak semua gerakan buruh berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), seperti Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) pada tahun 1947 yang berada dibawah Partai Masyumi, Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBRI) tahun 1948 yang berafiliasi dengan

Partai Murba dan Serikat Buruh Muslim Indonesia (SARBU-MUSI) tahun 1955 yang berafiliasi dengan Partai Nahdhatul Ulama (Saifuddin & Mahfud Naufal Ismail, 2012: 11). Pada masa Orde Lama, partai yang berhaluan buruh seperti Partai Komunis Indonesia (PKI) berhasil menjadi salah satu pemenang dalam pemilu pertama di Indonesia tahun 1955. Pada pemilu pertama tersebut sambutan rakyat cukup tinggi. Kemudian dalam perjalanannya pertentangan-pertentangan antara partai yang berhaluan buruh dengan partai nasionalis maupun agama semakin meruncing, dengan puncaknya terjadi peristiwa G30S. Selepas tragedi tersebut citra buruh semakin menurun. Adanya stigma bahwa gerakan buruh lebih mengarah ke kiblat komunis mengakibatkan degradasi partai buruh baik dari sisi jumlah anggota maupun jumlah partai yang berhaluan buruh.

Berbeda ketika Orde Baru berkuasa, gerakan buruh ditekang, akibatnya gerakan buruh semakin hilang arah. Hal tersebut dikarenakan pada zaman Orde Baru berkuasa menghindari konflik antara buruh dan majikan karena mengganggu stabilitas ekonomi. Hal ini selaras dengan program pemerintah ketika itu dengan jargon trilogi pembangunan, yang salah satu isinya adalah stabilitas keamanan. Oleh karena itu adanya praktek aksi mogok dianggap tidak selaras dengan prinsip kekeluargaan yang melandasi Pancasila. “Sedangkan ketentuan yang tegas membatasi antara lain Kepmen 4/Men/1986 yang menekan hak mogok dan kebebasan membentuk serikat buruh, Kepmen 342/Men/1986 yang menentukan aparat keamanan (Korem, Kodim, Kores) boleh ikut campur menangani perselisihan perburuhan (Joko Utomo dan Sutono, tanpa tahun)

Gerakan politik buruh pada awal Orde Reformasi jauh berbeda dengan orde sebelumnya. Di era ini, gerakan politik buruh terlihat lebih cair dan progressif. Namun demikian, selama Orde Reformasi berlangsung, capaian politik buruh di Indonesia belum pernah menjadi pemenang pemilu. Kemudian, bagaimana prospek politik buruh ke depan? Jawaban tersebut sebenarnya dapat dianalisis dari sejarah politik buruh khususnya setelah reformasi. Mengutip pernyataan Juliawan, bahwa gerakan buruh

disinyalir tidak akan berkembang menjadi partai politik (Julia Liawan 2011 dalam Mochtar Habibie 2013: 209). Padahal masuk ke dalam lembaga parlemen adalah salah satu jalan secara konstitusional untuk mempengaruhi keputusan politik. Namun demikian nampaknya buruh sendiri masih mengalami kesulitan dalam meraih kembali suara-suara buruh pada pelaksanaan pemilu (Triyono, 2011). Oleh karena itu, meraih zaman keemasan seperti sebelum Orde Baru berkuasa, nampaknya susah untuk meraihnya kembali. Meskipun jumlah buruh terbilang banyak, namun belum mampu menegakkan partai buruh untuk jaya kembali.

Potret buruh dalam partisipasi pemilu pasca reformasi belum menampakkan hasilnya. Meskipun gerakan buruh saat ini semakin terkoordinir, namun dalam bentuk ideologis sangat berbeda, untuk menyatukannya sangat susah, apalagi disisi lain setiap serikat atau konfederasi memiliki agenda tersendiri. Hal tersebut disebabkan persaingan politik dan perbedaan ideologi mewarnai hubungan antara berbagai federasi (Saptari, 2013: 33-34). Dampak adanya kondisi tersebut suara buruh terpecah. Kondisi tersebut menurut penulis justru akan mengakibatkan suara buruh sulit untuk mempengaruhi kebijakan parlemen atau pemerintah. Gagalnya partai yang berhaluan buruh pada pemilu tahun 1999, 2004, 2009 hingga tahun 2014 semakin menysihkan peran buruh dalam kancah perpolitikan nasional. Keberadaan buruh sebagai suatu entitas masyarakat, memiliki pengaruh terhadap jalannya demokrasi. Apalagi saat pemilu presiden 2014, tidak ada satupun calon presiden yang berasal dari buruh. Hal ini dikarenakan partai yang berhaluan buruh tidak satupun lolos dalam pemilihan tahun 2014. Suara kaum buruh menjadi rebutan diantara kandidat calon presiden pada pilpres 2014.

Menyikapi hal tersebut, kaum buruh dari latar belakang yang berbeda, seperti yang telah diduga sebelumnya memiliki sikap politik yang berbeda pula dalam menentukan arah perjuangannya melalui capres/cawapres yang akan datang. Hal ini dapat dilihat dari beberapa sikap yang telah diumumkan

oleh beberapa serikat/konfederasi buruh misalnya Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menyatakan akan tetap independen. Kemudian, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) mendukung Prabowo dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mendukung Jokowi. Dengan adanya peran strategis suara buruh dalam setiap pemilu seharusnya dijadikan modal atau pertimbangan calon presiden untuk mengambil suara mereka. Menyikapi fenomena tersebut sebenarnya partai-partai yang berkontestasi dalam pemilu 2014 telah memiliki *underbond partai* untuk meraih simpati buruh. Meskipun partai memiliki *underbond* perolehan suara dari kalangan buruh belum maksimal. Pada pemilu sebelumnya pasca reformasi tahun 1999-2014 tidak ada satupun partai yang memiliki suara lebih dari *elektoral tresold* 2,5% (KPU, 2014). Meskipun partai berafiliasi buruh seperti Partai Buruh Nasional dengan pimpinan Mukhtar Pakpahan sebagai salah satu kontestasi Pemilu 1999. Dalam pemilu pasca reformasi partai yang berhaluan buruh bisa dikatakan hanya sebagai penggembira saja. Karena belum mampu menunjukkan eksistensinya sebagai partai politik yang mendapat legitimasi dari rakyat. Legitimasi merupakan suatu pengakuan amanah rakyat kepada partai politik maupun pemimpin untuk menjalankan amanat.

Legitimasi rakyat terhadap partai politik tercermin dalam perolehan suara partai politik dalam pemilu. Dalam pemilu khususnya, pasca reformasi ini terlihat masih jauh dari harapan. Bahkan pemilu pasca reformasi yang sudah dilaksanakan selama empat kali yaitu pemilu tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014 perolehan suara partai yang berhaluan buruh hanya kurang dari 2,5 persen. Partisipasi buruh dalam pesta demokrasi tidak dapat kontinyu sebagai peserta pemilu. Hal ini tercermin pada tahun pemilu 2014 tidak ada satupun partai buruh yang ikut serta dalam pemilu. Hal ini semakin meminggirkan peran buruh dalam politik praktis. Meskipun secara kuantitas jumlah buruh di beberapa wilayah sangat dominan atau memiliki massa yang cukup besar, khususnya di kantong-kantong wilayah yang

dekat dengan industry, tapi faktanya hal itu belum mampu dimanfaatkan oleh partai buruh. Kemudian pertanyaan muncul mengapa dengan basis jumlah buruh yang besar, partai buruh dalam satu darsa terakhir tidak mampu berkembang. Jumlah buruh yang cukup besar di Indonesia ternyata tidak diimbangi dengan partai buruh yang cukup kuat. Hal ini sangat bertolak belakang jika dibandingkan dengan negara-negara industri lain di dunia seperti Inggris dan Australia yang memiliki partai buruh yang kuat.

Kemudian, bagaimana prospek politik buruh kedepan khususnya dalam pemilu 2019? Jika melihat perkembangan dinamika politik buruh saat ini, maka dapat diprediksi akan sangat sulit bagi partai buruh untuk meraih kemenangan dalam pemilu 2019. Untuk mengetahui lebih lanjut, penulis akan memaparkan di bagian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi buruh mengapa tidak mampu meraih kemenangan dalam pemilihan umum pada Pemilihan Umum 2019, serta apa saja yang mempengaruhi politik partai buruh dalam mengembangkan organisasinya bahkan mengembangkan ideologi perjuangannya.

Faktor-Faktor Penyebab Partai Buruh Tidak Mampu Meraih Kemenangan Pemilu 2019

a. Buruh Terfragmentasi dalam Sikap Politik dan Kesulitan Mengorganisasi

Dengan banyaknya ideologi dan mazhab distruktur organisasi buruh, maka mengakibatkan fragmentasi serikat/konfederasi buruh semakin melebar. Ideologi akan menyebabkan konfederasi memiliki agenda sendiri dan terkadang agenda antar serikat buruh akan saling bertentangan. Disisi lain serikat buruh maupun konfederasi sebagai salah satu embrio terciptanya partai buruh. Munculnya beragam ideologi dan bervariasinya serikat/konfederasi buruh semakin subur apalagi hal tersebut secara langsung didukung dengan adanya kebijakan ratifikasi

ILO No. 87 maka muncullah beragam serikat dan konfederasi buruh yang muncul. Disisi lain munculnya beragam serikat buruh maka menjadi salah satu ukuran bahwa kebebasan ber-serikat dan berpendapat semakin cair. Namun disisi lain munculnya beragam serikat buruh/serikat pekerja semakin memberikan tantangan yang luar biasa bagi buruh sendiri baik dalam bidang politik, maupun kesejahteraan. Disisi lain munculnya ratifikasi konvensi ILO No. 87, membangunkan kembali SB/SP yang sempat mati suri ketika orde baru hanya mengakui *single union* (Safifuddin: 2011). Di lain pihak kemunculan tersebut tidaklah mengherankan karena sebelum orde baru pun banyak SP/SB yang terbentuk. Dari sekian banyak SB/SP yang terbentuk memiliki falsafah, taktik dan strategi yang berbeda (Sandra, 2007: 127). Lebih lanjut dalam tulisan Sandra yang di edit oleh Surya Jtandra tersebut mengemukakan bahwa dapat dipahami jika SP/SB memiliki perbedaan sikap terhadap masalah ekonomi sosial dan politik (Sandra, 2007: 127). Hal inilah yang menjelaskan mengapa partai berhaluan buruh sangat sulit berkembang karena secara historis buruh memang terpecah sejak lama dari berbagai latar belakang ideologi. Meskipun sebenarnya buruh dapat disatukan dalam satu isu kesejahteraan. Namun jika menyentuh permasalahan politik khususnya partai maka sangat sulit untuk bisa satu suara.

Adanya perbedaan-perbedaan tersebut mengakibatkan perjuangan buruh terbentur idealisme sendiri. Padahal jika buruh sebagai salah satu partai politik yang kuat, maka secara langsung akan berdampak terhadap perjuangan-perjuangan buruh. Namun nampaknya hal tersebut sulit terwujud jika setiap SP/SB masih memikirkan ideologi masing-masing dan belum satu suara dan bermuara ke dalam satu wadah yang disebut partai politik baru. Padahal secara potensi buruh memiliki massa yang besar, disisi lain struktur partai mudah terbentuk karena hampir seluruh wilayah Indonesia telah berdiri sekretariat serikat pekerja ataupun serikat buruh. Buruh terpecah dan tidak mendesakkan kepentingannya (Hadiz, 1998; 2002, Tornquist, 2004 dalam Mochtar Habibe, 2013: 201). Terpecahnya berbagai suara

buruh adalah hasil dari proses sejarah. Dimana fragmentasi buruh merupakan kenyataan yang harus dihadapi.

Sejarah buruh tersebut pun terbukti pada pemilu 2014. Pada pemilu 2014 sikap buruh terpecah. Hal ini akan mengakibatkan pasca pemilu 2014 organisasi buruh semakin terkotak-kotak. Sehingga akan mengakibatkan antar buruh sendiri tidak sejalan dalam memperjuangkan hak-haknya. Bahkan hal ini sekarang terjadi dalam menyikapi persoalan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Di sisi lain setelah pasca pemilu 2014, organisasi buruh akan semakin terkooptasi oleh partai politik. Oleh karena itu, menurut penulis, lebih baik jika buruh sendiri segera membangun dan bertindak secara politis untuk menyiapkan konsolidasi nasional. Meskipun saat ini ada Gerakan Nasional Konsolidasi Buruh (GNKB) dan Majelis Pekerja/Buruh Indonesia (MPBI), dalam kenyataannya belum mampu menyatukan suara buruh. Padahal potensi menjadi partai yang besar terbuka. Oleh karena itu, buruh harus bersatu dan membentuk partai buruh sendiri, sehingga memiliki kekuatan untuk mempengaruhi publik. Tidak seperti sekarang ini buruh memperjuangkan hak-haknya melalui *extra* parlementer atau demo di jalan. Sehingga kadang mengganggu dunia usaha dan masyarakat umum. Jika partai buruh terwujud dan didukung oleh semua unsur buruh maka tidak menutup partai buruh akan menjadi kontestan pada pemilu 2019.

Kemudian bagaimana suara buruh dalam bidang sosial ekonomi dan budaya? Seperti yang telah dijelaskan dalam bagian tulisan di atas bahwa buruh ketika berhadapan dengan kepentingan isu sosial, ekonomi bahkan politik buruh tidak memiliki satu suara, bahkan terpecah. Adanya perpecahan ini secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perjuangan buruh dalam kontestasi politik nasional. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegagalan buruh dalam pertarungan pemilu pasca reformasi (Ford 2015 dalam Mochtar Habibie 2013: 201). Akibat kegagalan tersebut berdampak serius terhadap buruh dalam berpolitik. Dampak tersebut berupa politik buruh tidak mampu mempengaruhi kiblata atau suara politik di luar buruh. Hal ini

sangat wajar, di dalam struktur kelembagaan buruh saja masih ada friksi atau perpecahan apalagi ingin meraih suara lain dari luar buruh.

Friksi di dalam tubuh serikat buruh sendiri berpengaruh terhadap konsolidasi buruh dalam mengorganisasi gerakan politiknya. Oleh karena itu serikat buruh sebagai embrio politik buruh perlu sering berdialog dengan buruh atau anggotanya. Tujuannya agar terjalin soliditas diantara buruh sendiri dan menyamakan visi perjuangan. Selain adanya soliditas suara buruh diskusi pertemuan tersebut berguna untuk menampung aspirasi yang berkaitan dengan kondisi kerja, kesejahteraan anggota serikat buruh serta mengetahui kritik dari pekerja sendiri (Alvita, dkk: 2014: 9). Belajar dari kasus pemilu pilkada di Kabupaten Kudus, di mana suara buruh terpecah dan buruh cenderung pasif dalam berpolitik, hal ini mengingatkan pada temuan *Dicky Priambodo* (2008) dalam penelitiannya *Perilaku Memilih Buruh Rokok Dalam Pilkada Langsung Di Kabupaten Kudus Tahun 2008*. Dalam hasil penelitian tersebut, diungkapkan lebih lanjut bahwa pekerja/buruh, khususnya wanita, cenderung tergantung suara orang-orang di sekitarnya (Dicky Priambodo, 2008: 9). Selain itu suara buruh terpecah atas pragmatisme politik.

Hal ini menjelaskan bahwa meskipun buruh memiliki massa yang besar, namun tidak mampu meraih kemenangan politik praktis. Karena buruh sendiri telah memiliki berbagai ideologi dan orientasi politik sendiri. Di samping itu, ideologi yang dibangun oleh elit buruh belum seutuhnya sampai ke akar rumput buruh. Dengan demikian buruh hanya melakukan rutinitas semata, menjalankan pekerjaan dan pulang setelah selesai bekerja. Tanpa ada kegiatan yang lebih progresif seperti melakukan rapat hingga sampai ke akar rumput. Akibat tidak adanya posisi kaderisasi yang jelas dan organisasi yang kuat maka buruh hingga saat ini hanya mampu mengakar di beberapa kantong industri seperti di Jakarta, Batam dan daerah Karawang. Hal ini mengakibatkan buruh hanya mampu berbicara di level lokal, dan untuk mencapai politik di tingkat nasional masih sulit tercapai.

Lebih lanjut di bidang pengorganisasi buruh juga lemah, bahkan buruh tidak takut terhadap serikat pekerja buruh, justru buruh lebih takut kepada pemilik perusahaan (Dicky Priambodo, 2008: 11). Hasil penelitian Dicky Priambodo tersebut mengindikasikan bahwa peranan serikat buruh dalam mengelola orientasi politik praktis tidak berhasil. Serikat buruh hanya mampu untuk mengelola tuntutan buruh seperti kesejahteraan, jaminan sosial dan dialog dengan pengusaha. Hal tersebut terlihat dalam perjuangan Jaminan Sosial Nasional, meskipun ada beberapa element buruh yang kontra. Namun pada akhirnya, berhasil mengawal pembentukan Badan Jaminan Sosial Nasional (Triyono, 2011). Gerakan buruh hingga saat ini dapat dikatakan hanya spontan saja, ketika ada permasalahan-permasalahan yang menyangkut hajat kesejahteraan dan isu lainnya. Belum mampu mengawal bahkan mengintervensi kebijakan secara praktis baik kepada pemerintah maupun kepada legislatif. Meskipun di beberapa kesempatan buruh secara nasional berhasil mendesak kepentingannya. Namun demikian, penulis melihat bahwa pergerakan buruh masih sulit untuk menjadi kekuatan politik yang cukup kuat untuk mempengaruhi kebijakan publik.

Keberhasilan buruh dalam isu kesejahteraan tidak diimbangi dengan keberhasilan dalam ranah politik praktis seperti pilkada. Buruh tidak mampu terlibat dalam kompetisi karena suara buruh yang tidak solid. Ada beberapa sebab mengapa suara buruh tidak solid, di antaranya disebabkan oleh gaya kepemimpinan, *trust* yang masih kurang dan latar belakang aliran politik yang berbeda. Bahkan yang lebih parah adalah banyak penyalur tenaga kerja adalah milik para manajer personalia, atau pengurus serikat buruh di perusahaan tempat kerja buruh yang disalurkan (Indrasari, Hari, 2011: 10). Hal ini menyebabkan *trust* diantara buruh dan serikat pekerja menjadi berkurang. Modal sosial yang ada di buruh belum begitu tinggi. Hal tersebut ditambah konflik kepentingan antar pengurus, perebutan anggota antar serikat serikat semakin menambah daftar panjang bahwa buruh belum mampu menjaga soliditas maupun menjaga arah perjuangannya. Adanya elit buruh yang justru bermain dengan

nasib kesejahteraan buruh seperti upah, status bahkan menjadi penyalur semakin menambah parah gerakan buruh saat ini.

Hal ini juga yang menjadikan sebab mengapa memiliki partai buruh yang kuat menjadi berat bagi serikat buruh. Ibaratnya, sebagian elit buruh belum memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mampu membawa buruh kepada kesejahteraan dan menghindarkan diri dari eksploitasi. Adanya sebagian elit buruh yang masuk struktur perusahaan sebagai penyalur akan menyuburkan eksploitasi yang ada. Peristiwa ini justru elit buruh sebagai aktor dalam penindasan terhadap buruh itu sendiri. Hal ini akan menjauhkan peranan serikat buruh sendiri dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. Di level serikat buruh saja belum mampu membawa gerbong kesejahteraan apalagi jika sudah menjadi partai politik. Adanya fenomena tersebut akan mengurangi tingkat kepercayaan buruh sendiri dalam mengikuti serikat buruh bahkan menjadi anggota partai buruh. Karena adanya eksploitasi menjadi sumber bencana bagi serikat buruh untuk bermetamorfosis menjadi partai buruh yang kuat.

Sebenarnya ada solusi untuk mensolidkan suara buruh yaitu menumbuhkan rasa saling percaya diantara serikat buruh dan pekerja yaitu dengan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan, tidak hanya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi, misalnya melakukan nego-nego tertentu dengan pengusaha (Priambodo, 2008: 14). Kemudian di dalam tubuh serikat buruh sendiri harus memiliki sikap untuk memperjuangkan suara buruh dan tidak ada perebutan suara di antara serikat buruh sendiri. Kondisi saat ini ada persaingan antara serikat pekerja untuk merebut anggota dalam suatu perusahaan yang berdampak pada duplikasi keanggotaan pekerja di samping eksekusi perpecahan antara sesama pekerja (Oktav, 2011; 128). Di samping itu buruh yang menjadi *underbond* partai politik maka, partai buruh yang terbentuk pun menjadi kabur dalam perjuangannya (Soewartoyo, 2014: 45). Pernyataan Soewartoyo ini diperkuat oleh pernyataan Hadis bahwa partai-partai politik besar umumnya memiliki ikatan yang kuat dengan federasi-federasi buruh yang biasanya digunakan

sebagai kendaraan meraih suara (Hadis, 2005: 5). Bahkan pengurus kekuatan politik sangat kental dalam jajaran pengurus serikat buruh (MS Hidayat dalam Fadri, dkk, 2013:41). Kondisi-kondisi tersebut berakibat cengkeraman gerakan buruh tidak terlepas agenda politik nasional. Di samping itu, gerakan buruh tidak murni atas suara hati nurani kaum buruh sendiri. Adanya deskripsi tersebut maka gerakan buruh akan semakin sulit untuk tegak kembali seperti zaman Orde Lama, di mana ketika zaman tersebut partai yang berhaluan buruh cukup meraih suara dalam pemilu 1955.

Perjuangan partai buruh berada di bawah bayang-bayang partai buruh yang memiliki *underbond* buruh. Bahkan serikat buruh yang dibungkus dengan orientasi keagamaan, untuk sebagian berkaitan dengan pengembangan strategi baru dalam memobilisasi massa selektif yang dilakukan oleh kelompok elit negara (Hadis, 2005:5). Hal inilah yang semakin menasbihkan buruh sebagai kelompok yang bukan hanya saja lekat oleh partai politik, namun juga oleh elit negara.

b. Daerah Yang Memiliki Tingkat Pengangguran Yang Besar Maka Partai Buruh Tidak Menarik Masyarakat

Dari rangkaian sejarah buruh selalui diwarnai dengan hiruk pikuk ekonomi. Dalam pergolakan politik buruh, mereka tidak akan berkembang di daerah yang penganggurannya tinggi (Soekarno, Makmuri, 2014). Lebih lanjut Makmuri Soekarno mengatakan bahwa partai buruh dianggap penyebab kebangkrutan negara. Tidak berkembangnya partai buruh di kawasan yang memiliki pengangguran yang lebih tinggi disebabkan oleh adanya perbedaan perjuangan antara buruh dan penganggur. Bagi buruh perjuangan buruh adalah meningkatnya kesejahteraan, hak-hak buruh/pekerja yaitu dengan meningkatnya upah, terpenuhinya hak-hak normatif buruh serta jaminan sosial yang meningkat. Perjuangan buruh tersebut berakibat kepada tuntutan kepada perusahaan meningkat, dan bahkan kadang menyebabkan biaya operasional perusa-

haan meningkat. Akibatnya, perusahaan tidak melakukan efisiensi dengan berbagai cara misalnya mengurangi perekrutan tenaga kerja baru, melakukan PHK dan sebagainya. Dampak kebijakan tersebut mengurangi kesempatan kerja bagi penganggur untuk mencari pekerjaan. Bagi buruh tuntutan upah tinggi dan hak-hak buruh akan mempengaruhi daya serap tenaga kerja. Semakin tinggi upah maka akan mengakibatkan pasar kerja semakin sempit. Karena perusahaan akan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan operasional dan tuntutan buruh. Akibatnya para pencari kerja akan sulit untuk memasuki pasar tenaga kerja. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa organisasi serikat buruh sulit diterima di daerah yang memiliki tingkat pengangguran yang tinggi. Hal ini cukup berbeda dengan daerah yang memiliki industri yang cukup banyak atau kawasan industri.

Di kawasan industri dengan beragam lapangan kerja yang ada, keberadaan serikat buruh justru sangat berguna. Selain didukung tingkat pengangguran yang lebih rendah dibanding daerah lain, secara ideologis juga tidak bertentangan dengan para pencari kerja di daerah tersebut. Hal ini disebabkan karena mereka mengalami kesulitan dalam mencari kerja di banding daerah yang bukan kawasan industri. Justru di sisi lain, keberadaan serikat kerja akan membantu buruh mendapatkan hak-haknya, dan masyarakat pencari kerja juga tertarik dengan pasar kerja terbuka lebar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pertumbuhan organisasi serikat buruh berdampak terhadap kesadaran buruh dalam berorganisasi, tumbuhnya solidaritas dalam memperjuangkan hak-haknya (Zamzani, 2011: 111).

Oleh karena itu, pengangguran berpengaruh terhadap intensitas gerakan buruh. pengangguran semakin tinggi di suatu wilayah, maka tingkat gerakan buruhnya tidak militan. Hal ini dikarenakan gerakan-gerakan buruh mendapatkan perlawanan dari kalangan penganggur. Oleh karena itu jika hal ini tidak diamati dan dicarikan solusinya justru akan menghambat gerakan buruh itu sendiri.

c. Perbedaan Struktur Buruh di Negara Maju dan Indonesia

Di negara maju, struktur buruh Indonesia mendominasi dibandingkan dengan di Indonesia. Di Indonesia struktur buruh lebih didominasi oleh buruh tani. Di negara maju, partai buruh laku karena karena segmen pasarnya buruh industri (Soekarno, Makmuri, 2014). Hal ini sangat berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia, jumlah buruh industri lebih kecil dibandingkan buruh tani, dan dalam hal ini partai buruh di Indonesia kurang jeli dalam melihat permasalahan ini. Akibatnya partai yang berhaluan buruh selalu kalah dalam pemilu. Hal ini terbukti pasca reformasi partai buruh selalu kalah bahkan tahun 2014 tidak ada satupun partai buruh sebagai peserta pemilu.

Pembentukan partai akan tergantung pada seberapa kuat tuntutan kebutuhan masa-buruh dalam skala nasional terhadap hadirnya sebuah partai buruh yang mandiri. Semakin banyak buruh yang membutuhkan kehadiran sebuah partai, kemungkinan pembentukan sebuah partai buruh independen akan lebih besar dapat dilakukan. Aksi jalanan belakangan memang masih dirasa efektif sebagai senjata buruh melakukan tuntutan. Dalam kondisi demikian, kebutuhan akan sebuah partai nampak belum terasa (Habibie, 2013: 211). Namun demikian gerakan-gerakan tersebut hanya terbatas kepada buruh industri dan tidak menyentuh buruh tani.

d. Adanya Pengaruh Kekuatan Pasar Bebas

Pasar bebas seperti Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), sebagaimana diketahui, telah diberlakukan. Pemberlakuan ini tidak hanya memengaruhi daya saing buruh dalam mendapatkan pekerjaan, namun di sisi politik, buruh juga akan terpengaruh. Pasar bebas akan mengurangi kekuatan buruh untuk berorganisasi. Hal ini dikarenakan sebagian besar buruh menurut penulis, akan berusaha sendiri untuk mencapai kesejahteraan atau mencari hidup bagi dirinyasendiri. Apalagi, kompetisi

yang dihadapi begitu berat dengan tenaga kerja dari luar. Buruh tidak hanya tidak lagi memiliki waktu yang cukup untuk berserikat, namun juga sibuk dengan rutinitas. Oleh karena itu, adanya pasar bebas ini jika tidak disiapkan dengan matang, maka serikat buruh akan terdegradasi baik dari sisi jumlah anggota, organisasi, maupun kekuatan politik untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Bagaimanapun juga pasar bebas secara langsung akan bersentuhan dengan kehidupan buruh, dan daya saing maupun kesempatan dalam meraih lapangan kerja. Dengan demikian secara langsung akan mempengaruhi psikologis buruh untuk bergabung dalam serikat buruh bahkan dalam partai politik.

Partai Buruh Sulit Untuk Meraih Kemenangan Dalam Pemilu 2019

Dalam kondisi politik saat ini, buruh sebagai element masyarakat masih sangat sulit untuk membentuk partai politik. Hal tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam tulisan di bagian atas. Pembentukan partai akan tergantung pada seberapa kuat tuntutan masa buruh dalam membentuk partai buruh kebutuhan masa-buruh (Habibie, 2013: 211). Bahkan buruh semakin tidak solid jika merunut sikap politik buruh dalam pemilu 2014. Buruh masih terjebak dalam lingkaran politik partai, misalnya masih menjadi *urderbond* partai lain. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi adalah adanya pengorganisasian ke dalam buruh sendiri. Oleh karena itu, masih panjang untuk menantikan partai buruh yang memiliki ideologi dan kuat.

Kesimpulan

Pergolakan politik buruh akan terus berlangsung, Dan untuk memiliki partai politik yang kuat, buruh masih memerlukan beberapa pembenahan. Pembenahan tersebut diantaranya konsolidasi organisasi kedalam, adanya *trust* antar buruh, dan buruh perlu melebarkan sayap ke segmen masyarakat di luar buruh. Politik

buruh ke depan masih belum memberikan ruang yang besar untuk tumbuhnya partai buruh yang memiliki akar yang kuat. Oleh karena itu diperlukan kerja yang keras, baik bagi buruh atau serikat buruh jika ingin kembali ke pentas politik nasional. Apalagi sekarang buruh masih mewarisi terkotak-kotaknya buruh pasca pemilu 2014. Hal ini menjadi tantangan buruh dalam mensolidkan gerakannya. Melihat berbagai fakta sejarah dan dinamika yang terjadi di tubuh buruh dalam berpolitik, maka dapat diprediksi buruh akan sulit kembali meraih suara dalam pemilu dan semakin jauh meraih kekuasaan di parlemen.

Daftar Pustaka

- Andrian, Sutedi. 2011. *Hukum Perburuhan*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Bachrun, Saifuddin dan Mahfud Naufal Ismail. 2012. *Kiat Mengelola Mogok Kerja dan Demo*. Penerbit PPM : Jakarta.
- Detri, Pamungkas Nugraha, Trilaksana Agus. 2013. *Pemogokan Buruh (PT. Catur Putra Surya Porong-Sidoarjo Tahun 1993)*. Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah Volume 1, No. 3, Oktober 2013 461.
- Fajar, Satriando Perdana. 2012. *Fungsi Serikat Pekerja Dalam Perlindungan Hak - Hak Pekerja Di PT. PAL Indonesia Menurut Undang – Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Dan Perumahan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur : Surabaya.
- Fajri, Dkk. 2013. *Efektivitas Pola Verikasi Serikat Pekerja/Buruh Dalam Kerangka Kebebasan Berserikat*. Jakarta : Puslitbang Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.

- Gebu Alvita, Ari Pradhanawati² & Reni Shinta Dewi. 2014. "Pengaruh Peran Serikat Pekerja dan Kompensasi Terhadap Kesejahteraan Buruh Wanita Studi Kasus di PT. Hanil Indonesia". *Diponegoro Journal Of Social And Political Of Science* Tahun 2014, Hal. 1- 9. <http://ejournal-s1.un-dip.ac.id/index.php/>. Diunduh 1 Maret 2015.
- Habibi, Muhtar.2013. *Gerakan Buruh Pasca Soeharto: Politik Jalanan di Tengah Himpitan Pasar Kerja Fleksibel*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 16, Nomor 3, Maret 2013 (200-216).
- http://kpu.go.id/dmdocuments/modul_1d.pdf
- P, Oktav, Zamzani. 2011. *Pedoman Hubungan Industrial*. PPM Manajemen : Jakarta
- Priambodo, Dicky. *Perilaku Memilih Buruh Rokok Dalam Pilkada Langsung Di Kabupaten Kudus Tahun 2008*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Kirom. Sazalil. 2013. *Buruh Dan Kekuasaan: Dinamika Perkembangan Gerakan Serikat Pekerja Di Indonesia (Masa Kolonial – Orde Lama)*. Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah Volume 1, No. 1, Januari 2013
- R, Vedi, Hadis. 2005. *DINAMIKA KEKUASAAN Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto*. Penerbit Pustaka LP3ES: Jakarta
- Saptari, Ratna. 2013. *Bangsa Dan Politik Perburuhan Dalam Proses Dekolonisasi*. Dalam Erwiza Erman dan Ratna Saptari (ed). KITLV-Jakarta-NIOD-Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta
- Sandra. 2007. Editor Surya Tjandra : *Sejarah Pergerakan Buruh Indonesia*. Trade Union Right. Jakarta
- Tjandraningsih, Indrasari. 2011. *Editorial Pasar Kerja Fleksibel : Jarak Antara Teori dan Praktek*. *Jurnal Analisis Sosial* Vol.16. No.1 September 2011. Bandung

Triyono. Gerakan Buruh Dan Kesejahteraan. Dimuat di Website Pusat Penelitian Politik LIPI pada tanggal 23 April 2013

Utomo, Joko dan Sutono. Tanpa Tahun. *PHK Dalam Sistem Kontrak Dan*

Permasalahannya Di Era Reformasi. Universitas Muria Kudus

Peraturan Perundangan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention (Number 87) Concerning Freedom Of Association And Protection Of The Right To Organise* (Konvensi Nomor 87 Tentang Kebebasan Berserikat Dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi)

Undang-Undang No 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh